

# STRATEGI KEAMANAN MARITIM INDONESIA DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN POROS MARITIM DUNIA DI KAWASAN SAMUDERA HINDIA (2015-2018)

## INDONESIA'S MARITIME SECURITY STRATEGY IN REALIZING THE GLOBAL MARITIME FULCRUM POLICY IN THE INDIAN OCEAN REGION (2015-2018)

Sonta Purnama I M Sianturi<sup>1</sup>, Surya Wiranto<sup>2</sup>, Purwanto<sup>3</sup>

Universitas Pertahanan  
([spims1994@gmail.com](mailto:spims1994@gmail.com))

**Abstrak** - Samudera Hindia merupakan salah satu lautan yang menjadi pusat kepentingan negara-negara berpengaruh di dunia sekarang ini. Selain terdapat persaingan pengaruh, terdapat beberapa tindak kejahatan yang menjadi ancaman keamanan maritim di wilayah ini. Presiden Joko Widodo merespon tantangan dan ancaman keamanan maritim yang ada melalui Kebijakan Poros Maritim Dunia, dengan mengarahkan Indonesia sebagai salah satu kekuatan maritim di antara kawasan Indo-Pasifik. Upaya pencapaian visi ini adalah melalui Perpres 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia yang memiliki Lampiran II berupa Rencana Aksi yang memuat strategi setiap kementerian dan lembaga pemerintah dalam rangka pelaksanaan PMD. Fokus dari penelitian adalah strategi keamanan maritim Indonesia dalam pelaksanaan kebijakan PMD di kawasan Samudera Hindia pada tahun 2015-2018. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan eksplanatori. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai strategi keamanan maritim Indonesia yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan visi PMD. Adapun data-data yang digunakan adalah data-data yang terkait strategi dan kebijakan yang dilakukan oleh kementerian terkait dengan pelaksanaan PMD di wilayah Samudera Hindia seperti Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan beserta Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sebagai operator pertahanan berkaitan dengan kemaritiman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ancaman keamanan maritim di wilayah Samudera Hindia dan tantangan persaingan geopolitik. Sejauh ini Indonesia telah melakukan beberapa strategi berkaitan kerja sama dan diplomasi maritim untuk melaksanakan PMD sebagai upaya menjaga kestabilan dan keamanan maritim di wilayah Samudera Hindia sebagai respon dari pergolakan geopolitik di kawasan.

**Kata Kunci** : Strategi, Kebijakan, Keamanan Maritim, Poros Maritim Dunia, Samudera Hindia

**Abstract** - Indian Ocean is one of oceans which is the center of global interest nowadays. Apart from competition for influences, there are several crimes which is a maritime security threat in this region. President Joko Widodo responded to the challenges and threats of maritime security through the Global Maritime Fulcrum Policy, by directing Indonesia as one of the maritime powers between the Indo-Pacific region. The effort to achieve this vision is through Presidential Regulation No.16 of 2017 concerning Indonesian Maritime Policy which has Action Plans for each ministry and government agency in the context of the realization of the GMF. Focus of the research is Indonesia's maritime security strategy in the realization of the GMF Policy in the Indian Ocean region in 2015-2018. This study

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

<sup>2</sup> Dosen Tetap Universitas Pertahanan.

<sup>3</sup> Dosen Tetap Universitas Pertahanan.

uses a qualitative methodology with an explanatory approach. This study aims to provide an overview of Indonesia's maritime security strategies carried out by ministries and institutions. The data used are strategies and policies carried out by the relevant ministries of GMF such as the Coordinating Ministry of Maritime Affairs, Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Defense along with the Indonesian Navy. The results of the study show that there are maritime security threats in the Indian Ocean region and the challenges of geopolitical competition. So far Indonesia has carried out several strategies relating to maritime cooperation and diplomacy to implement GMF as an effort to maintain maritime security and stability in the Indian Ocean region in response to geopolitical upheavals in the region.

**Keywords : Strategy, Policy, Maritime Security, Global Maritime Fulcrum, Indian Ocean**

## **Pendahuluan**

Keamanan nasional (*national security*) yang sekarang sering terjadi merupakan situasi ketidakstabilan global dikarenakan adanya *insecurities* yang muncul akibat ancaman non-tradisional. Keamanan maritim merupakan salah satu dari isu keamanan non-tradisional yang sedang meningkat dan banyak menjadi kajian baru untuk pembahasan global dikarenakan isu-isu di wilayah maritim yang banyak menyangkut permasalahan global sekarang dan juga lintas batas negara maupun aktor yang terlibat.

Indonesia merupakan negara yang tidak akan luput dari masalah maritim. Terletak pada posisi strategis di antara dua benua dan dua samudera serta memiliki 4 dari 9 *choke point* dunia menyebabkan Indonesia menjadi wilayah yang memiliki potensi besar pada kancah kemaritiman global. Selain letak yang strategis elemen penting lainnya seperti wilayah negara yang luas di mana Indonesia memiliki wilayah dengan garis

pantai terpanjang, memiliki luas daratan dan lautan yang besar. Ditinjau dari segi maritim, Indonesia apabila memanfaatkan dengan maksimal akan muncul sebagai negara maritim yang besar didukung dengan faktor eksternal yang dimiliki. Oleh faktor pendukung inilah, Indonesia pada masa kepresidenan Joko Widodo memiliki gagasan Poros Maritim Dunia (PMD) dengan cita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara maritim.

Potensi maritim yang ingin diaplikasikan ke dalam PMD perlu diimplementasikan dalam rangka pertahanan dan keamanan negara serta menunjukkan eksistensinya di dunia global. Terdapat dua poin yang diterapkan dalam upaya mendukung pertahanan dan keamanan maritim Indonesia pada PMD yakni poin kedua; pertahanan serta keamanan penegakkan hukum dan keselamatan di laut, serta poin ketiga; tata kelola dan kelembangaan di laut. Berdasarkan poin

tersebut Indonesia telah memulai melakukan pengamanan dan tata kelola di wilayahnya dengan melakukan patroli pengamanan yang terintegrasi antar-instansi.

Namun apabila ingin menjadi negara yang merupakan keseimbangan antara dua samudera pengapitnya yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, maka Indonesia harus bisa menjaga dan mengontrol kedua wilayah tersebut. Samudera Pasifik yang merupakan wilayah besar selama bertahun-tahun dimana 2/3 perdagangan dunia berada pada kawasan ini dan juga munculnya negara-negara demokratik baru yang semakin membuat kawasan ini semakin kompleks dan banyak kepentingan di wilayah ini. Namun wilayah Samudera Pasifik yang sudah diperkuat dengan adanya kehadiran *Indo-Pacom* yang merupakan pertahanan militer antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik bersama dengan Amerika Serikat yang ingin membendung pengaruh militer China. Hal tersebut berbeda dengan wilayah Samudera Hindia yang juga merupakan wilayah besar di Timur

Indonesia namun kurang stabil dibanding Pasifik.

Samudera Hindia memiliki luas hampir 20% permukaan bumi yang terdiri dari perbedaan yang besar atas nilai-nilai politik, budaya, ekonomi, lingkungan dan kerangka geopolitik.<sup>4</sup> Luas wilayah yang sebesar 2/3 lautan dan 1/3 daratan ini menjadikan kawasan Samudera Hindia merupakan wilayah yang sangat krusial. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Donald L. Berlin bahwa Samudera Hindia yang pasca Perang Dunia ke-II tidak begitu diperhatikan pada abad ke-21 menjadi pusat dari geopolitik, hubungan internasional dan geostrategi serta area perebutan dunia dikarenakan letak dan sumberdayanya yang strategis.<sup>5</sup> Perebutan kekuasaan tersebut menyebabkan adanya kerawanan keamanan di wilayah ini. Oleh karena hal tersebut maka terdapat alasan yang realistis untuk penguatan PMD pada kawasan Samudera Hindia demi menjaga pertahanan dan keamanan maritim Indonesia yang dapat terpengaruh apabila kestabilan di wilayah tersebut tidak tercapai.

---

<sup>4</sup> Bouchard, Christian dan Crumplin, William. "Neglected No Longer: The Indian Ocean at the Forefront of World Geopolitics And Global Geostrategy." *Journal of the Indian Ocean Region* Vol 6, No 1, June 2010, pp 26-51

<sup>5</sup>Berlin, Donald L.. "Neglected No Longer: Strategic Rivalry in the Indian Ocean", *Harvard International Review*, Vol 24, no 2, 2002. pp 26-31.

Untuk itu penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana ancaman dan tantangan keamanan maritim yang berasal dari Samudera Hindia periode 2015-2018 serta Bagaimana strategi keamanan maritim Indonesia dalam pelaksanaan kebijakan Poros Maritim Dunia di kawasan Samudera Hindia.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi. Selanjutnya peneliti akan memberikan gambaran dengan secara cermat tentang fenomena yang terjadi mengenai strategi keamanan maritim Indonesia dalam pelaksanaan PMD di Samudera Hindia.

Subyek penelitian merupakan tempat di mana data untuk variabel penelitian diperoleh. Subyek penelitian ini merupakan orang, tempat, yang diamati dalam rangka sebagai tujuan atau sasaran<sup>6</sup>, terutama dalam menjelaskan

permasalahan penelitian yang berkaitan dengan strategi keamanan maritim Indonesia adalah berupa strategi kementerian lembaga terkait PMD. Kebijakan PMD yang tertera pada Perpres 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia serta Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia yang ada pada Lampiran II Kebijakan Kelautan Indonesia. Institusi yang dijadikan sebagai subyek penelitian adalah Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Pertahanan RI, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan TNI AL.

Sampel penelitian merupakan obyek permasalahan yang diteliti. Menurut Sugiyono<sup>7</sup>, obyek penelitian adalah suatu atribut dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini memiliki sampel penelitian yang terdiri dari para narasumber yang berkompeten dalam menjawab permasalahan penelitian yang terkait kebijakan PMD.

---

<sup>6</sup> Arikunto, S., *Manajemen Penelitian*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005).

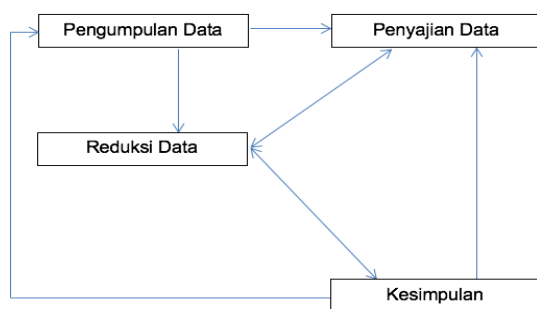
<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*

*Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2012).

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data adalah jenis penelitian kualitatif agar dapat diperoleh data yang mendalam, jelas, dan spesifik. Selanjutnya bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi, komunikasi personal, dan gabungan/triangulasi.

Pemeriksaan keabsahan data melalui dokumentasi dan referensi, hasil wawancara dan email korespondensi selama penelitian. Selanjutnya bahwa pemeriksaan keabsahan data dapat diperoleh dari hasil gabungan/triangulasi dari metode observasi, dokumentasi, dan komunikasi personal.

Teknik analisa data dilakukan dengan menggunakan teknik dari Miles dan Hubermann dengan langkah-langkah yang dijabarkan pada gambar berikut:



**Gambar 1. Analisa Data Miles Hubermann**

Sumber : Creswell, J. W. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan (Edisi Ke-3)*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015)

## Pembahasan

### **Reaksi Pemerintah Indonesia terhadap Ancaman Keamanan Maritim dan Tantangan di Samudera Hindia 2015-2018**

Berdasarkan konsep geopolitik maritim dikatakan bahwa, geopolitik maritim adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem politik, ekonomi, sosial, dan ideologi yang mengacu pada domain maritim yang perlu untuk dibahas lebih lanjut dikarenakan urgensinya. Maka yang dilakukan Indonesia dengan keberadaan Kebijakan PMD yang mengangkat urgensi ancaman dan tantangan yang berada di Samudera Hindia adalah reaksi yang disesuaikan dengan lingkungan strategisnya dimana negara-negara di dunia mengarahkan perhatian dan kebijakan luar negerinya untuk memanfaatkan Samudera Hindia. namun apabila ada urgensi dan kepentingan yang saling tumpang tindih di sebuah wilayah, akan menyebabkan ancaman yang mengganggu keamanan kawasan tersebut; dalam hal ini yang terganggu adalah keamanan maritim kawasan Samudera Hindia.

Terdapat lima aspek keamanan maritim yang dijabarkan oleh Barry Buzan yaitu keamanan dari laut itu sendiri, pemerintahan di laut (*ocean governance*)

proteksi keamanan batas wilayah maritim, aktivitas militer di laut dan regulasi keamanan terhadap sistem transportasi laut. Permasalahan maritim yang ada di wilayah Samudera Hindia dan dalam wilayah Indonesia sendiri berusaha untuk diatasi dengan meminimalkan permasalahan yang ada dan mengupayakan tercapainya keamanan maritim Indonesia dengan mencapai lima aspek tersebut.

Ancaman keamanan maritim dan tantangan yang ada di wilayah Samudera Hindia memang akan dan terus berkembang seiring dengan perkembangan lingkungan strategis yang dinamis. Potensi yang terkandung dan proyeksi kekuatan negara-negara kedepannya menyebabkan wilayah ini akan terus menjadi *hot area* atau *the next theatre of conflict*. Sebagaimana yang diungkapkan oleh para narasumber peneliti bahwa Samudera Hindia merupakan wilayah yang penting bagi Indonesia tidak hanya dikarenakan wilayahnya yang luas dan letaknya yang berada di barat Indonesia dan menyebabkan wilayah Samudera Hindia mengapit Indonesia bersama dengan Samudera Pasifik, namun dikarenakan adanya peningkatan aktivitas

internasional di wilayah tersebut sehingga Indonesia pun perlu menjaga dan memanfaatkan wilayah tersebut. Apabila melihat dari permasalahan yang muncul pada wilayah tersebut, permasalahan mengenai tindak kriminal kita perlu waspada adalah permasalahan *transnational organized crime* (permasalahan lintas negara) beberapa contoh diantaranya adalah permasalahan perompakan, pembajakan, terorisme maritim, penyelundupan manusia dan barang (senjata atau narkoba) dan *IUU Fishing* yang menjadi fokus negara-negara disekitarnya untuk meniadakan atau mengurangi agar keamanan maritim di wilayah tersebut dapat tercapai.

Selain ancaman yang ada di wilayah tersebut, munculnya kepentingan negara-negara besar di wilayah Samudera Hindia menyebabkan ancaman yang mungkin akan muncul dimasa yang akan datang akan lebih cepat menjadi nyata atau akan adanya ancaman yang ada. Terhadap ancaman yang nyata dan akan datang, perlu adanya persiapan atau antisipasi terutama menyangkut keamanan nasional bangsa. Indonesia merupakan salah satu negara besar yang berada di kawasan Samudera Hindia yang tentunya akan terpengaruh

atas segala aktivitas yang ada di wilayah tersebut. Salah satu aktivitas yang membangkitkan kawasan Samudera Hindia yang selama ini tidak memiliki banyak aktivitas maritim adalah adanya pembangunan jalur BRI China yang memulai negara-negara seperti India, Amerika dan Australia ikut merespon. Indonesia tentu saja perlu menyadari akan ancaman dan tantangan yang muncul dengan adanya inisiatif tersebut.

Kebijakan PMD yang berlaku semenjak pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2015, merupakan kebijakan yang berangkat dari konstelasi geografis Indonesia dan juga melihat perkembangan lingkungan strategis dimana di wilayah Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta melihat kebutuhan yang diperlukan untuk menyejahterakan rakyat Indonesia dengan melakukan pembangunan infrastruktur dan konektivitas agar wilayah Indonesia yang luas dapat sama rata merasakan kemajuan negara. Selain melakukan pembangunan ke dalam (*inward looking*) diperlukan upaya untuk menggaungkan kepentingan nasional Indonesia yaitu dengan melakukan pendekatan forum internasional di sekitar wilayahnya (*regional*) yaitu Samudera

Hindia dan Samudera Pasifik (*outward looking*). Fokus perhatian dunia yang awalnya hanya berada di Pasifik akhirnya berkembang ke arah Hindia. muncullah kebijakan US-INDOPACOM yang merupakan *counter balance* dari kebijakan BRI China. Indonesia yang berada di wilayah perbatasan silang tentu perlu memanfaatkan situasi tersebut, dikarenakan adanya kemampuan Indonesia untuk mengambil keuntungan dari situasi yang ada, inilah yang menjadi dasar pemikiran Kebijakan PMD. Indonesia ingin memanfaatkan situasi geopolitik kawasan untuk mengambil keuntungan dan menunjukkan kekuatannya.

Kekuatan yang ditunjukkan oleh sebuah negara tidak selalu menggunakan upaya-upaya koersif. Tetapi juga bisa dilakukan dengan melakukan upaya *smart approach* seperti yang dilakukan oleh China dengan menggunakan investasi ekonomi untuk pembangunan jalur sutra maritimnya. Indonesia yang selama ini menggunakan upaya upaya diplomatik dan pendekatan forum internasional memanfaatkan hal tersebut untuk membuat negara-negara disekitarnya merasakan keberadaan dan kepentingan Indonesia, upaya diplomatik Indonesia

memanfaatkan permasalahan yang ada menjadi permasalahan bersama dan mendorong serta meyakinkan negara-negara lain untuk secara bekerja sama dan gotong royong dalam memerangi hal tersebut bersama dengan kepemimpinan Indonesia. Penyamaan persepsi akan ancaman dan pengusulan inisiasi dan ide inilah yang menyebabkan Indonesia memiliki kekuatan tersendiri di kawasan dan menjadi negara yang mampu bersaing secara regional bahkan global. Salah satu upaya yang dilakukan Indonesia selain menggunakan forum diskusi internasional adalah dengan menggunakan tata kelola pemerintahan di laut yang sedang dalam proses penyempurnaan yaitu Buku Putih Diplomasi Maritim, dimana diharapkan dengan penyempurnaan buku putih tersebut terdapat norma-norma yang jelas dalam tindakan dan aktivitas yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh negara pengguna laut agar laut dapat digunakan berkelanjutan (*ocean governance*). Tidak hanya itu, *ocean governance* pun dapat diupayakan dengan melakukan penataan terhadap sistem transportasi laut dalam negeri demi menjaga keselamatan pelayaran. Inilah mengapa ALKI dibutuhkan dan dijalankan dengan baik dikarenakan

butuh adanya kontrol terhadap pengguna perairan kedaulatan Indonesia untuk meminimalisir ancaman yang dapat terjadi.

Upaya Indonesia untuk menjaga keamanan maritim tentu tidak hanya bisa dilakukan di luar wilayah kedaulatannya saja, tetapi harus dimulai dengan wilayah teritorial dan kedaulatannya. Menghadapi permasalahan batas maritim, Indonesia terus berusaha dalam melakukan perundingan batas maritim demi mencapai kesepakatan dan mampu melakukan tindakan yang sewajarnya di wilayah kedaulatannya, dikarenakan apabila perbatasan maritim tidak mencapai kesepakatan, akan saling tumpang tindih hukum yang berlaku antara negara yang saling berbatasan langsung dan tidak ada penanganan yang tepat apabila terjadi pelanggaran di wilayah tersebut dan hal tersebut tentu akan memberikan dampak buruk bagi kedaulatan negara.

Cara dalam menjaga keamanan maritim selain menggunakan pendekatan diplomasi adalah melakukan pendekatan yang memberikan efek bahwa Indonesia bukan negara yang dapat diremehkan. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa Indonesia melakukan latihan gabungan

ataupun pembentukan militer dalam rangka menjaga pertahanan negara dikarenakan dengan cara demikian, negara ataupun aktor kriminal yang mengganggu wilayah Indonesia dapat mengetahui besar kekuatan alutsista Indonesia, ini yang menyebabkan industri pertahanan maritim dan modernisasi alutsista dibutuhkan dalam menjaga pertahanan negara yang prima dalam menjaga dan mendukung perbatasan.

Lebih lanjut dari upaya penjagaan keamanan maritim di wilayah kawasan yang dilakukan oleh Indonesia menggunakan kebijakan PMD, terdapat agenda besar dengan adanya kebijakan tersebut, yaitu guna merespon aktivitas geopolitik di kawasan sekitar Indonesia. Kondisi geopolitik kawasan Samudera Hindia dengan adanya kepentingan tiap-tiap negara tidak mengecilkan keinginan Indonesia untuk kembali pada dasar undang-undang negara yang mengawali segala tindakan dan aktivitas negara berdasarkan apa yang dimiliki negara, dimana konstelasi geografi, sumber daya alam dan manusia dan juga historis negara yang seharusnya bergerak atau terproyeksi dari lautan. Oleh karena itu, agar permasalahan dan tantangan yang dihadapi Indonesia bisa berkurang,

Indonesia menggunakan upaya non-militer untuk meminimalisir pergesekan kepentingan tiap negara yang ada di persaingan perebutan pengaruh di kawasan tersebut. Salah satu upaya yang digunakan yaitu dengan menggunakan forum internasional ataupun kerja sama dalam bentuk kerja sama pertahanan, ekonomi dan sosial lainnya. Kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia pun merupakan salah satu upaya Indonesia dalam memaksimalkan kepentingan negara dan tujuan negara dalam mencapai perdamaian dunia dan membawa kesejahteraan bagi rakyatnya sendiri dengan memaksimalkan sumber daya negara dan memanfaatkan investasi, informasi dan pengakuan dari bangsa lain bahwa Indonesia memiliki kesungguhan dalam forum dan kerja sama tersebut yang akhirnya akan memberikan keuntungan bagi Indonesia berupa dukungan dalam forum yang lebih besar lagi. Dukungan yang didapatkan Indonesia secara tidak langsung akan membuktikan kepemimpinan Indonesia pada kawasan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disandingkan reaksi pemerintah Indonesia terhadap tantangan dan ancaman yang ada di Samudera Hindia

pada waktu yang sama merupakan salah satu dari upaya penggunaan geopolitik maritim dalam rangka penanganannya. Mengapa dikatakan menggunakan upaya geopolitik maritim? Hal ini dikarenakan permasalahan mengenai penguasaan wilayah pada era ini tidak lagi permasalahan kepemilikan wilayah seperti pada saat Perang Dunia I dan II yang menggunakan militer dalam pencapaian tujuannya, namun pada era ini, geopolitik yang dimainkan oleh pemerintah Indonesia adalah kepemilikan berdasarkan kekuatan pengaruh yang menggunakan sumber daya maritim. Dikarenakan wilayah yang ada saat ini sudah tidak dapat lagi dikuasai selain menggunakan cara ekspansif ataupun reklamasi. Reklamasi wilayahpun tidak akan memberikan dampak terhadap perluasan wilayah kekuasaan dikarenakan merupakan wilayah artifisial, namun ekspansi yang dilakukan Indonesia adalah ekspansi yang berdasarkan kepercayaan dan pengakuan atas kepemimpinan Indonesia akan upaya Indonesia dia forum global dalam memecahkan masalah. Hal ini yang dilakukan Indonesia dalam menjalankan geopolitik dan geostrateginya. Memanfaatkan permasalahan bersama, menginisiasi dan memberikan ide dalam

penyelesaian masalah tersebut sehingga Indonesia mendapatkan kepercayaan dalam memimpin wilayah tersebut tanpa mengurangi kedaulatan bangsa lain tetapi mampu menjalankan kepentingan negaranya dan mencapai tujuan.

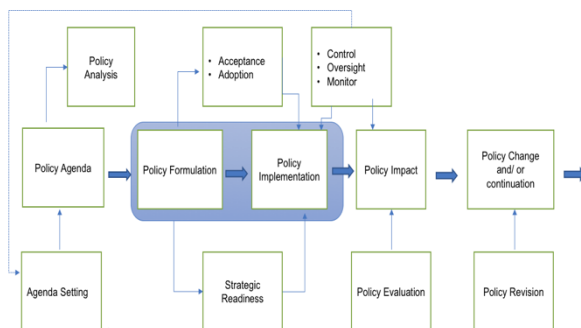
Pendekatan regionalisme merupakan cara Indonesia dalam mengatasi aktivitas ancaman keamanan maritim seperti yang disebutkan di atas dan persaingan geopolitik kawasan. Mengapa Indonesia merasa penting menggunakan pendekatan regionalisme, hal ini dikarenakan Indonesia mengedepankan upaya *soft approach* seperti yang dijabarkan di atas, pendekatan regionalisme akan memudahkan Indonesia dalam mencapai tujuan tersebut dikarenakan usaha yang dilakukan Indonesia dalam mencapai kestabilan dan keamanan kawasan dapat terbantu oleh kepentingan dan bantuan dukungan berupa kontrol bersama negara sekitar. Inilah yang menyebabkan Indonesia lebih cenderung menggunakan forum regional seperti ASEAN dan IORA.

Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat disimpulkan singkat bahwa poin-poin yang digunakan Indonesia dalam menggunakan pendekatan geopolitik dan regionalisme

dalam mencapai keamanan maritim telah dilaksanakan walaupun belum maksimal berdampak positif dikarenakan masih terjadinya pelanggaran keamanan maritim.

### **Strategi Pemerintah Indonesia untuk Meningkatkan Keamanan Maritim di Samudera Hindia**

Berdasarkan teori kebijakan publik menurut Riant Nugroho, terdapat beberapa poin dalam penyelenggaraannya dari awal direncanakan kebijakan hingga evaluasi yang memberikan hasil. Teori tersebut sesuai dengan Gambar 2



**Gambar 2 Dinamika Kebijakan Publik**

Sumber : Riant Nugroho. *Public Policy*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo,2009)

Sebuah rancangan kebijakan berawal dari agenda kebijakan yang merupakan hasil dari pengaturan kebijakan yang menghasilkan analisis kebijakan. Tahap kedua setelah ada agenda kebijakan adalah perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan.

Pada tahap ini secara bersamaan akan dilihat bagaimana reaksi dari masyarakat terhadap perumusan tersebut dan bagaimana kesiapan dari strategi untuk menerapkan kebijakan pada tahap implementasinya. Selama proses implementasi tersebut, kebijakan akan dipantau, dikontrol dan diawasi oleh pihak yang memiliki wewenang demikian terhadap kebijakan tersebut. Proses tersebut akan berlaku pada tahap selanjutnya juga yaitu untuk mengetahui dampak dari kebijakan. Terhadap dampak yang didapat dari kebijakan akan diadakan evaluasi kebijakan yang selanjutnya akan mempengaruhi pengaturan kebijakan lanjutan. Setelah mengetahui hasil dari evaluasi dampak kebijakan, selanjutnya akan diputuskan apakah kebijakan tersebut akan dilanjutkan atau diubah. Jika kebijakan tersebut diubah, maka ada proses revisi kebijakan.

Sedangkan pada teori strategi, strategi memiliki tiga variabel yaitu tujuan(*ends*), alat (*means*) cara (*ways*). Ketiga hal tersebut merupakan poin poin yang penting menjadi dasar pembentukan kebijakan yang diikutsertakan dalam pertimbangan formulasi kebijakan dan implementasi

kebijakan. Apabila melihat pada proses tahapan kebijakan publik tersebut, maka dapat dijabarkan bagaimana pembentukan kebijakan PMD, apakah sudah sesuai dengan dinamika kebijakan publik ideal. Penjabaran mengenai proses tahapan kebijakan PMD dengan hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut;

- a. Agenda kebijakan, pada tahap agenda kebijakan dilakukan prioritas terhadap masalah-masalah serius yang hendak diselesaikan; Pada tahap ini diawali oleh adanya ancaman dan tantangan yang muncul bagi keberadaan negara sehingga kebijakan tersebut dirasa perlu untuk direncanakan. Dilakukan analisa kebijakan yang menyangkut lingkungan strategis serta keadaan dan kondisi negara dalam rangka melihat kemungkinan yang akan datang dimasa depan. Hal-hal yang menjadi pertimbangan diantaranya adalah sumber daya yang dimiliki berupa sumber daya alam, manusia dan juga sumber daya buatan dan bagaimana kepentingan negara dihadapkan dengan situasi tersebut. Pada poin

ini, agenda kebijakan pembentukan PMD adalah melihat perkembangan strategis dikawasan dan melihat kembali sumber daya dan konstelasi geografis bangsa yang merupakan wilayah kepulauan dan memiliki potensi dari lautan yang banyak dan adanya ancaman serta tantangan dari kawasan regional dan global mengenai perkembangan di kawasan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Oleh karena itu pemerintah menetapkan Perpres Nomer 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Tujuan (*ends*) dari kebijakan pun diperlukan dimana KKI bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional sesuai dengan tujuan dari strategi Kebijakan PMD.

- b. Formulasi kebijakan, pada tahap ini dilakukan pengembangan terhadap pilhan atau alternatif tindakan atau program untuk

menyelesaikan masalah. Dikarenakan adanya perkembangan di kawasan, maka Indonesia merasa perlu untuk tidak hanya menjadi penonton dikawasan yang dimana Indonesia merupakan salah satu pusat pergerakan di wilayah tersebut, sehingga melihat adanya beberapa permasalahan yang ada, Indonesia menentukan permasalahan yang akan dibawa pada kebijakan PMD dimana terdapat 7 pilar kebijakan<sup>8</sup> yang menjadi fokus pembahasan dan pengembangan kebijakan. Ketujuh pilar tersebut ialah

- 1) Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 2) Pertahanan, Keamanan Penegakkan Hukum dan Keselamatan di Laut;
- 3) Tata Kelola dan Kelembagaan di Laut;
- 4) Ekonomi, Infrastruktur dan Peningkatan Kesejahteraan;
- 5) Pengelolaan Ruang Laut dan Pelindungan Lingkungan Laut,
- 6) Budaya Bahari, dan

7) Diplomasi Maritim.

Pemilihan ketujuh pilar tersebut, berdasarkan pertimbangan analisis kebijakan yang dirasakan sesuai dengan pencapaian tujuan, sehingga fokus dari sumber daya yang dimiliki oleh negara dalam menjalankan kebijakan tersebut akan berupaya untuk mencapai tujuh pilar kebijakan tersebut yang dapat dikategorikan sebagai alat (*means*) dalam strategi. Sumber daya yang dimaksud berupa sumber daya alam yang difokuskan pada sumber daya yang berorientasi kelautan dan kemaritiman, sumber daya manusia berupa komponen pertahanan utama TNI (AL) dan badan keamanan, kementerian dan lembaga terkait serta rakyat yang mampu memberikan kontribusi tidak hanya pertahanan tetapi juga dalam segala aspek sebagai bentuk bela negara. Sumber daya buatan seperti sarana dan prasarana yang mendukung untuk kemajuan orientasi kebijakan kelautan. Teknologi yang bisa dimanfaatkan

---

<sup>8</sup> Peraturan Presiden No 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia

pada kecanggihan alutsista pertahanan dan juga teknologi dalam bidang kelautan. Dan juga alat pendukung berupa pendanaan dan anggaran.

- c. Adopsi/penentuan kebijakan, mengembangkan salah satu alternatif yang telah disepakati, yang selanjutnya dilakukan pelegalan atau pengesahan. Dimana dalam tujuh pilar kebijakan ditentukan lima program prioritas yang harus diselesaikan dan dikerjakan dalam kurun waktu yang diberikan yaitu satu periode. Program prioritas tersebut terdapat dalam Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia yang terdiri dari lima klaster program prioritas dengan memiliki target dan sasaran strategi serta penanggung jawab dari strategi kebijakan tersebut. Dimana pelaksanaan atau implementasi kebijakan tersebut merupakan bagian dari cara ( ways) strategi dalam mencapai tujuan strategi kebijakan. Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia tercantum pada Lampiran II Perpres 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan

Indonesia yang berisi 76 kebijakan utama dari ketujuh pilar KKI.

- d. Evaluasi kebijakan, melihat efektivitas kebijakan dalam penyelesaian masalah dan dampak yang diberikan; Pada tahap ini, kebijakan akan dilakukan evaluasi terhadap penerapan selama program berjalan atau menjelang periode kebijakan berakhir. Pada Kebijakan PMD, terdapat evaluasi setiap triwulan untuk tiap tahunnya akan dilakukan laporan kementerian Koordinator bidang Kemaritiman yang merupakan penanggung jawab kebijakan ini. Sejauh hampir tahun berjalan, kementerian dan lembaga telah melaporkan hasil capaian setiap program kerja kebijakan yang dilakukan dalam mendukung PMD dan Kemenkomar telah melaporkan hasilnya kepada presiden untuk dilakukan revisi atau peningkatan program kerja.
- e. Keberlanjutan strategi, melihat hasil evaluasi dan dampak yang diberikan maka *feedback* akan menjadi acuan untuk melanjutkan kebijakan atau

melakukan revisi atau mengubah. Terhadap hasil laporan kebijakan PMD, sejauh ini telah dilakukan evaluasi dengan hasil yang disimpulkan adalah perlunya keberlanjutan dari Kebijakan Kelautan Indonesia. Oleh karena itu, Kemenkomar bersama dengan kementerian terkait sedang merampungkan Buku Putih Diplomasi Maritim yang merupakan keberlanjutan dari kebijakan PMD.

Terhadap bagan kebijakan publik menurut Riant Nugroho, Kebijakan PMD telah memenuhi setiap aspeknya. Namun apabila melihat strategi pemerintah Indonesia dalam peningkatan keamanan maritim di Samudera Hindia, dari rencana aksi dan program kebijakan strategis yang dilaksanakan, belum mengarah kepada Samudera Hindia sebagai salah satu fokus proyeksi kekuatan maritim Indonesia. Hal ini dapat dikatakan karena tidak banyak strategi kebijakan yang dilakukan di wilayah kedaulatan Indonesia yang berbatasan dengan Samudera Hindia. Sejauh ini, kebijakan atau kegiatan yang telah dilakukan Indonesia baru pada tahap pembentukan dasar infrastruktur dan pembangunan dalam negeri. Kegiatan yang mengarah pada kestabilan

dan keamanan maritim di Samudera Hindia hanya bersifat kerja sama keamanan kerja sama maritim dengan negara-negara di Samudera Hindia sehingga bersifat diplomasi atau tidak mengikat secara utuh atau belum merupakan peraturan dan norma hukum di wilayah tersebut yang mampu memberikan efek signifikan terhadap penindakan kegiatan kriminal yang terjadi dan bisa berdampak ke Indonesia secara besar.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Terdapat ancaman dan tantangan keamanan maritim Indonesia yang datang dari wilayah Samudera Hindia periode 2015 hingga 2018. Ancaman keamanan maritim yang lazim terjadi adalah kejahatan yang berkaitan dengan *transorganized crime* diantaranya pembajakan kapal, perompakan bersenjata, penyelundupan narkoba dan manusia serta *IUU fishing*. Namun upaya penanggulangannya telah dilakukan melalui upaya diplomasi dan kerja sama serta melakukan penguatan

penegakkan hukum didalam negeri diupayakan untuk mengurangi bahkan mengeliminasi ancaman. Tantangan yang muncul diantaranya adalah adanya perkembangan geopolitik negara-negara di dunia seperti China, India, dan Australia untuk bersaing pengaruh di kawasan tersebut. Respon Indonesia untuk menjaga keamanan maritim wilayah tersebut adalah dengan melakukan strategi-strategi yang berada dibawah kebijakan PMD yang pada tahap ini adalah tahap awal pelaksanaannya.

- b. Strategi keamanan maritim Indonesia yang mengarah ke wilayah Samudera Hindia diantaranya adalah kebijakan yang menyangkut kegiatan *IUU Fishing*, penanganan pembajakan dan perompakan di laut dengan adanya patroli terkoordinasi, dan kerja sama serta diplomasi maritim melalui IORA ataupun bilateral dalam rangka memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang konsisten menjaga keamanan maritim di kawasan dan memiliki poin

kepemimpinan untuk memimpin penyelesaian permasalahan kemaritiman. Terdapat tiga kementerian yang secara langsung melakukan strategi keamanan maritim tersebut yaitu, Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan sebagai perencana strategis dengan TNI AL sebagai pelaksana.

## Referensi

### Buku

- Arikunto, S. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

### Jurnal

- Bouchard, Christian dan Crumplin, William. "Neglected No Longer: The Indian Ocaean at the Forefront of World Geopoliticss And Global Geostrategy." *Journal of the Indian Ocean Region* Vol 6, No 1, June 2010, pp 26-51
- <sup>1</sup>Berlin, Donald L.. "Neglected No Longer: Strategic Rivalry in the Indian Ocean", *Harvard International Review*, Vol 24, no 2, 2002. pp 26-31

### Perundang – Undangan

- Peraturan Presiden No 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia

